

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang didasarkan pada Dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Pelaksanaan RPJMD tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara masih mengacu pada RPJMD 2010 – 2015 berhubung saat ini masih dalam proses penyiapan rencana awal RPJMD 2015-2020 maka penyusunan Rencana kerja (Renja) SKPD tahun 2017 tetap mengacu pada dokumen perencanaan sebelumnya. RPJMD di jabarkan lebih lanjut melalui Renstra SKPD dan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya yang memuat Program dan Kegiatan prioritas dan Kegiatan Pembangunan yang diusulkan dari Masyarakat Hasil Musrenbang Kecamatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang memuat skala Prioritas Pembangunan, Pendanaan dan Program dan Kegiatan pada setiap SKPD.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen Perencanaan yang memuat tentang program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta sebagai alat pengukuran kinerja pada akhir tahun.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 dalam tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang sistim perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

- Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang sistim perencanaan pembangunan Partisipatif;
 23. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
 24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45);
 25. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

I. 3. Maksud dan Tujuan

I.1.1. Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

I.1.2. Tujuan :

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
- b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara.
- c. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- d. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

I. 4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
- 3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbang, Politik dan Linmas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesbang, Politik dan Linmas

SKPD	CAPAIAN KINERJA OUT COME DAN OUT PUT		KRITERI CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN					KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
	(100%) 2015 (%)	(80%) 2011-2016 (%)	2015	2011-2016	JUM LAH KEG IAT AN	REND AH (%)	SESUAI TARGET (%)	MELE-BIHI TARGET (%)	TDK TERLAK -SANA (%)	% YANG MEMENU HI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BADAN KES-BANG	91,34	95,79	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	16	0	14	1	2	
	91,67	88,05			0	0	87,50	6,25	12,50	Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Kesbang, Politik dan Linmas pada tabel 2.1 Renja Badan Kesbang, Politik dan Linmas, Capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Badan Kesbang, Politik dan Linmas khusus tahun 2015 masing-masing sebesar 91,34% dan 91,67% dari yang semestinya 100% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah **SANGAT TINGGI** Sementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari tahun 2011 s.d 2016 Badan Kesbang, Politik dan Linmas tersebut masing-masing telah mencapai 95,79% dan 88,05% dari yang semestinya 80% untuk tahun ke 5 RPJMD atau Renstra Badan Kesbang, Politik dan Linmas, dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2011-2016 adalah **SANGAT TINGGI** Dan dari capaian tersebut total 16 kegiatan yang ada, jumlah kegiatan yang terlaksana berdasarkan target antara lain Rendah tidak ada, sesuai/tercapai 14 atau 87,50% yang melebihi target satu kegiatan sementara masih ada 2 (dua) kegiatan yang di programkan dalam rencana kerja tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat di Lihat pada tabel berikut:

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

II.2.1. Indikator Kinerja Fungsi Pelayanan Badan Kesbang dan Politik yang mengaju ke Renstra 2016-2021

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDIS I AWAL 2015	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA AKHIR PRIODE
					201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	2021	
1 2	Meningkat nya Pemahaman Masyarakat tentang nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah konflik Sosial	Kejadian	19	18	15	12	10	10	7	
		Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	2	1	1	2	1	2	1	
	Meningkat nya Partisipasi Politik Masyarakat	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	2	1	2	2	2	1	2	
		Jumlah LSM	LSM	14	15	20	25	30	35	40	
		Angka Kriminalitas	Kasus	89	79	69	59	49	39	29	
		Jumlah Demo	Kegiatan	8	7	6	5	4	3	2	

II.2.2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Pada tahun 2015, alokasi anggaran Belanja Langsung untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 2.415.000.000,- dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2010	Target 2015	Capaian 2015
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat	Tepat	Tepat
2.	Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D	B	cc
3.	Terwujudnya tata penyelenggaraan politik dan pemerintahan yang baik	Jumlah ormas dan parpol yang terdaftar	Ormas	6	11	19
		Jumlah kegiatan pembinaan politik	Parpol	59	12	10
		Jumlah kegiatan pembinaan politik	Kegiatan	1	1	1
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Meningkatnya jumlah masyarakat mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	Org	150	150	150
5.	Terwujudnya iklim politik yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak sipil dan politik	Jumlah kasus konflik kepengurusan partai politik	Kasus	0	1	2
		Jumlah kasus konflik kepengurusan ormas	kasus	-	1	-
6.	Terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil	Persentase wajib pilih yang ikut dalam Pilkada	%	-	67	77,24

		Jumlah kasus sengketa Pilkada	kasus	-	1	-
7.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	Jumlah kasus kriminalitas	kasus	1	4	26
		Rata-Rata kejadian ketentraman dan ketertiban	Kasus	1	25	26
8.	Meningkatnya peran serta masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah anggota Linmas yang terlatih	Org	5	300	580

Dengan Melihat tabel sasaran dan indikator Kinerja diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik dimana proses laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP, target dan capaian kinerja 2015 telah dilaksanakan dengan tepat.
2. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik dengan status laporan kinerja kategori BAIK dimana target dan capaian kinerja berpredikat CC.
3. Terwujudnya Tata Penyelenggaraan Politik dan Pemerintahan yang baik terdiri dari 2 (dua) Indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah Ormas dan Partai Politik yang terdaftar; 2) Jumlah Kegiatan Pembinaan Partai Politik berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja tersebut pada jumlah Ormas yang terdaftar pada tahun 2015 target 11 Organisasi Masyarakat (Ormas) sedangkan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terdaftar 19 Organisasi Masyarakat sedangkan Partai Politik yang terdaftar yang lolos verifikasi di pusat di

Kementrian Hukum dan HAM 12 (Dua Belas) Partai Politik dengan masa Priode 2014-2019 dari 12 Partai Politik peserta Pemilu Legislatif hanya 10 (Sepuluh) Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Luwu Utara 2 (dua) Partai Politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Luwu Utara yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan untuk kegiatan Pembinaan Partai Politik dari Target 1 kegiatan dengan realisasi 1 Kegiatan yang merupakan kegiatan Verifikasi terhadap Bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik.

4. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang wawasan Kebangsaan dengan indikator jumlah masyarakat mengikuti sosialisasi wawasan Kebangsaan dengan capaian 100 Persen dengan adanya sosialisasi wawasan Kebangsaan diharapkan Masyarakat memahami dengan sungguh-sungguh nilai-nilai wawasan kebangsaan sehingga terbentuklah sikap moral yang kuat guna memperkuat Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI
5. Terwujudnya Iklim Politik yang Kondusif bagi Pemenuhan hak-hak sipil dan Politik terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu : 1) Jumlah kasus konflik kepeguruan Partai Politik; 2) Jumlah Kasus konflik kepengurusan Ormas, ada dua kasus kepeguruan Partai Politik yaitu Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kasus konflik terjadi pada Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diakibatkan adanya perselisihan pengurus di Pusat yang sampai saat ini belum terdapat putusan Peradilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap, sehingga bantuan Keuangan tidak

- dapat dicairkan menunggu sampai dengan peradilan yang mempunyai hukum tetap. Sedangkan untuk kasus konflik kepeguruan ormas tidak ada
6. Terlaksananya Pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, Jujur dan Adil terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu : 1) Persentase Wajib pilih yang ikut dalam Pemilihan Presiden ; 2) Jumlah Kasus Sengketa Pilkada. Dari hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara tercatat jika Partisipasi pemilih sebanyak 169.438 orang (77,24%) dengan melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa Partisipasi mengalami peningkatan jika di bandingkan pada pemilu Legislatif tahun 2014 sebanyak 166.907 orang (75,30%) dan pemilu Presiden tahun 2014 sebanyak 161.022 orang (72,56%) untuk kasus sengketa pilkada tidak ada.
7. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja dengan maksud agar jumlah kasus kriminalitas menurun, adanya konflik yang terjadi selama ini karena adanya kesalahpahaman antar kelompok Pemuda . Adapun langkah-langkah yang diambil terkait dengan adanya konflik yang terjadi di Masyarakat: 1). melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap warga yang bertikai guna mengantisipasi secara dini dan cegah dini, 2). Melakukan pencegahan, penanganan pemulihan pasca konflik yang berkelanjutan, 3. Melakukan hubungan harmonisasi kemasyarakatan terhadap warga yang bertikai dengan melibatkan TNI, Polri, Kominda, FKUB, FKDM serta unsur ormas dan LSM.
8. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan indikator Kinerja Jumlah Anggota Linmas yang terlatih

target 300 personil dengan capaian 580 Personil melebihi target yang direncanakan.

II.2.3. Program dan Kegiatan 2016

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat pagu Anggaran Rp. 9.000.000
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pagu Anggaran Rp.7.200.000
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor pagu Anggaran Rp.21.895.000
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor pagu Anggaran Rp. 5.000.000
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan pagu Anggaran Rp. 12.000.000
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pagu Anggaran Rp.150.000.000
- g. Penatausahaan keuangan, Administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan Aset pagu Anggaran Rp. 314.895.550

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 36.151.450
- b. Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor Rp. 6.000.000
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pagu Anggaran Rp. 14.200.000
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor pagu Anggaran Rp. 10.000.000

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

- a. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan pagu Anggaran Rp. 94.405.000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu Anggaran Rp. 9.000.000

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

- a. Kunjungan kerja bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat Atas/Unit terkait pagu Anggaran Rp. 25.000.000

6. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak kriminal

- a. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan pagu Anggaran RP. 389.900.000
- b. Forum Kewaspadaan Masyarakat pagu Anggaran RP. 203.000.000

7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a. Pertemuan Berkala Tim Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) pagu Anggaran Rp. 179.800.000
- b. Pertemuan Berkala Forum pembauran kebangsaan (FPK) pagu anggran Rp. 157.300.000
- c. Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara pagu anggaran Rp. 56.750.000

9. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- a. Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Partai Politik pagu Anggaran Rp. 135.212.000
- b. Pengujian kepatutan calon kepala Desa terhadap pancasila dan UUD 1945 Anggaran Rp. 37.040.000
- c. Pemantauan terhadap LSM dan Ormas pagu anggaran Rp. 56.400.000

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Sinkronisasi Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pagu Anggaran Rp. 31.200.000

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah pagu Anggaran Rp. 28.650.000

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbang, Politik dan Linmas adalah :

1. SEKERTARIAT

- ✓ Masih kurangnya dukungan penganggaran dalam menunjang tupoksi
- ✓ Kurang nya SDM aparatur yang terlatih
- ✓ Lemahnya pengelolaan administrasi

2. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- ✓ Heterogenitas penduduk dan kondisi alam menjadi Potensi komplik dimasyarakat
- ✓ Laju Pertumbuhan penduduk yang meningkat, yang tidak sebanding dengan lahan dan lapangan kerja dapat memicu terjadinya sengketa pertanahan
- ✓ Maraknya penggunaan Narkotika dan sejenisnya dikalangan masyarakat

3. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

- ✓ Lemahnya pendidikan politik masyarakat
- ✓ Belum optimalnya parpol dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat
- ✓ Lemahnya KIS antar SKPD dalam pelaksanaan kegiatan yang berbasis kemasyarakatan
- ✓ Belum tertatanya dengan baik ormas yang ada yang berdampak pada kurangnya pemberdayaan dalam bentuk fasilitasi kebijakan

4. BIDANG INTEGRASI BANGSA

- ✓ Melemahnya wawasan NKRI baik dikalangan pelajar maupun masyarakat yang ditandai dari maraknya perkelahian kelompok
- ✓ Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Nasionalisme

II.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rancangan awal RKPD akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas .

Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD dapat di Lihat pada tabel Pada lampiran.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional menegaskan bahwa salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bottom up dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Dari hasil pelaksanaan Musrenbag yang dilaksanakan di tingkat kecamatan usulan prioritas untuk tahun 2017 dari setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel di bawah :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017 KABUPATEN LUWU UTARA

NO	Program dan kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan				
1	Pembangunan Pos Siskamling	Kelurahan Bone - Bone	Jumlah Pos Siskamling yang di bangun	1 Unit	

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) 2015-2019 merupakan RPJMD ke-3 (ketiga) sebagai kelanjutan dari RPJMD sebelumnya dari keseluruhan 4 (empat) tahap rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) Bidang yang menjadi Fokus Pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu :

1. Sosial Budaya dan kehidupan beragama
2. Ekonomi
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi(Iptek)
4. Politik
5. Pertahanan keamanan
6. Hukum dan aparatur
7. Pembangunan Wilayah dan tata Ruang
8. Penyediaan sarana dan Prasarana
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup

Berkenaan dengan 9 (sembilan) Bidang diatas, terdapat beberapa kebijakan terkait lingkup tugas dan Fungsi Badan Kesbang, Politik dan Linmas dalam kerangka RPJMD 2015-2019 yaitu:

- a. Isu-isu terkait dengan penciptaan kondisi aman dan damai
 1. Mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa
 2. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Badan Kesbang, Politik dan Linmas

Dalam rangka mencapai visi dan misi maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan Sasaran .

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan sasaran Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Luwu Utara :

Tujuan 1 : Mewujudkan system politik yang demokratis, dinamis dan transparan dengan sasaran:

1. Terwujudnya Tata Penyelenggaraan Politik dan Pemerintahan yang Baik.

Tujuan 2 : Memantapkan integrasi, persatuan dan kesatuan bangsa dan ketahanan bangsa dengan sasaran:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan

Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja kemandirian infrastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan sasaran:

1. Terwujudnya iklim Politik yang kondusif bagi pemenuhan hak – hak sipil dan Partai Politik

Tujuan 4 : Meningkatkan kinerja Admimistrasi Pemerintah dengan sasaran:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik
2. Terwujudnya Adminstrasi pemerintahan yang efisien dan

efektif

Tujuan 5 : Mendorong terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan sasaran :

1. Terlaksananya Pemilu yang Langsung, umum, Bebas, rahasia, jujur dan adil

Tujuan 6 : Menciptakan situasi dan kondisi idiologi, Politik, ekonomi dan sosial budaya yang kondusif dengan sasaran :

1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat
2. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban dan keamanan

III.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Program kerja operasional sebagai implimentasi kebijakan yang ditetapkan. Program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Program

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 4. Penyediaan Bahan Bancaan dan Peraturan Perundang-undangan
 5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 6. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawian, Ketatausahaan dan Aset
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e. Peningkatan Pelayanan Kedinasan
 1. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD\ /Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait
- f. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- g. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
 2. Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda
 3. Bimtek bela Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi aparat Desa
 4. Kemah Persaudaraan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda
 5. Sosialisasi dan pencerahan wawasan kebangsaan bagi siswa SLTA
- h. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
 2. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik
 3. Fasilitasi Peran FKUB
 4. Pertemuan berkala Tim Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama
- i. Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
 1. Pembinaan Anggota Linmas
- j. Pendidikan Politik Masyarakat
 1. Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Partai Politik
 2. Pengujian Kepatuhan Calon Kepala Desa terhadap Pancasila dan UUD 1945
 3. Pemantauan terhadap LSM, Ormas dan Parpol
 4. Penyuluhan kepada Masyarakat
 5. Koordinasi Forum-forum diskusi politik
 6. Penyusunan data Base Partai Politik, LSM dan Ormas
 7. Bimtek Pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
 8. Sukses Pemilu
- k. Pencegahan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
 1. Pemantauan dan penyebaran informasi bencana alam

- l. Program perencanaan pembangunan
 1. Sinkronisasi Fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbang, Politik dan Linmas ini disusun sebagai acuan Badan Kesbang, Politik dan Linmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan sebagai implementasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.

Rencana Kerja tahunan (Renja) Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen perencanaan yang didasarkan pada Renstra Badan Kesbang, Politik dan Linmas tahun 2016-2021. Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang Program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai dasar untuk menyusun RKA, serta sebagai alat pengukuran kinerja pada akhir tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbang, Politik dan Linmas dilakukan dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesbang, Politik dan Linmas.

Masamba, 2016

Kepala Badan
Kesbang, Politik dan Linmas

Ir. BURAMIN DANNU
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19600412 198903 1 010

